
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik **di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur** *(Electronic-Based Government System in the Regional Government of East Sumba Regency)*

Leonard Marten Doni Ratu, ST, MT¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

¹Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sumba Timur

E-mail: leonard.ratu@unkriswina.ac.id

KEYWORDS:

Electronic-Based Government System, Information Technology, Efficiency, Accountability.

ABSTRACT

The Electronic-Based Government System is the use of Information and Technology media to provide services to the public in an efficient, transparent and accountable manner, therefore the use of services using Information and Communication Technology media is a necessity that can be implemented in all aspects of human life, both in the field of Government services. , Private and Business and Business Actors, Education and all Components of Society, so that all Processes can be carried out Quickly, Efficiently, Transparently and can be done from anywhere. The East Sumba Regency Government is one of the service entities to the public, it is obligatory to provide better and more efficient services to the wider community, as well as between entities providing public services.

KATA KUNCI:

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi, Efisiensi, Akuntabel.

ABSTRAK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan Penggunaan media Teknologi dan Informatika untuk memberikan layanan kepada Publik secara efisien, transparan dan akuntabel, oleh sebab itu pemanfaatan Layanan menggunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan keniscayaan yang dapat diimplementasikan di segala sendi kehidupan manusia, baik di bidang layanan Pemerintahan, Swasta dan Pelaku Bisnis dan Usaha, Pendidikan dan semua Komponen Lapisan Masyarakat, sehingga semua Proses dapat dilakukan dengan Cepat, Efisien, Transparan dan dapat dilakukan dari mana saja. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu entitas layanan kepada Publik, wajib hukumnya untuk menyediakan layanan yang semakin baik dan efisien kepada masyarakat luas, maupun antar entitas penyelenggara layanan publik.

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

SPBE adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. SPBE bukan hanya milik Perangkat Daerah Kominfo akan tetapi merupakan urusan bersama seluruh Perangkat Daerah dimana dalam melaksanakan implemmentasi e-Government perlu dilakukan perencanaan yang komprehensif yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kabupaten, layanan system yang menjangkau ke seluruh tatakelola / birokrasi pemerintahan, sehingga seluruh komponen pemerintah kabupaten mau tidak mau siap tidak siap, semua akan terlibat langsung dalam implementasinya.

Tujuan dari implementasi pengembangan SPBE adalah untuk memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan publik dan berinteraksi dengan pemerintah kabupaten; memperbaiki kepekaan dan respon pemerintah kabupaten terhadap kebutuhan warga; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi pengembangan SPBE dalam rangka menuju pemerintahan yang baik dan benar, bukan lagi sebagai inisiatif coba-coba yang hanya ingin mendapatkan award dari institusi pemeringkatan kematangan implementasi, akan tetapi sudah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat, kalaziman jaman serta amanah nasional. Kajian pemeringkatan hanya digunakan sebagai umpan balik yang selanjutnya digunakan untuk mengejar ketertinggalan dan memonitor arah implementasinya.

Sehubungan dengan peran Teknologi dan Informasi yang semakin berkembang dewasa ini disegala bidang, maka penting untuk dilakukan penelitian terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dijalankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dimana Penulis bekerja (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur) dan juga sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah

Jaringan Komputer dan Pemrograman Berbasis Jaringan pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dapat dipergunakan sesuai dengan Peran dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik yang lebih Efisien, transparan dan Akuntabel dengan mewujudkan *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik).

METODE PENELITIAN

Perancangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sumba Timur Penulis lakukan dengan mengumpulkan Pustaka dan Kajian serta Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mewajibkan semua Penyelenggara Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah untuk mengimplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di segala Bidang Layanan Publik. Oleh sebab itu Penulis yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang membidangi Teknis Layanan Teknologi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur) dan juga Dosen Pengampu Matakuliah Jaringan Komputer dan Pemrograman Berbasis Jaringan pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, melihat dari sisi Pemanfaatan Teknolgi Informatika maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur membutuhkan Rancangan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Standart, Aturan dan Proses Bisnis yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dan dapat digunakan sebagai Acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang melayani Publik, sehingga layanan tersebut semakin efisien, transparan dan akuntabel.

Hasil akhir dari rancangan Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berupa Peraturan Bupati yang mengikat semua Perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Timur agar dapat menjadi acuan dalam Perencanaan, Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan Data dan Informasi serta menjadi Panduan dalam Implementasi Aplikasi-aplikasi layanan Publik baik yang bersifat layanan umum maupun layanan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kajian dan analisis yang mendalam terkait kondisi secara umum terkait Kelembagaan, Sarana Prasarana, Perencanaan dan Implementasi Teknologi Informasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka diperoleh beberapa Persoalan dan Solusi untuk dapat dilakukan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Efisien, transparan dan akuntabel sebagai berikut :

Permasalahan Umum

- 1 Belum banyak dipahaminya bahwa pengembangan SPBE adalah dilakukan oleh dan untuk seluruh komponen pemerintah kabupaten,
- 2 Masih banyaknya proses birokrasi di Perangkat Daerah yang belum diotomatisasikan

Kebijakan

- 1 Belum ada regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang kebijakan, prosedur operasional standar sebagai pedoman implementasi SPBE untuk semua Perangkat Daerah dan komponen pemerintah kabupaten
- 2 Adanya Perangkat Daerah yang membangun sendiri infrastruktur dan aplikasinya tanpa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo, kondisi ini beresiko pada terjadinya inefisiensi pengelolaan anggaran dan sistem pengamanan informasi.

- 3 Belum banyak dipahaminya bahwa seluruh aset informasi yang dikelola pemerintah kabupaten melalui Perangkat Daerah harus bisa dimanfaatkan juga oleh Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan. Setiap komponen pemerintah kabupaten wajib menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data milik pemerintah kabupaten.
- 4 Tujuan SPBE adalah efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik untuk itu seluruh pengembangan dan pengelolaannya harus terintegrasi dalam satu koordinasi, untuk itu setiap pengelolaan TIK pemerintah kabupaten selayaknya mengacu ke standar yang telah ditentukan dan perlu dilakukan audit secara berkala untuk memastikan kelayakan dan kehandalan implementasinya

Kelembagaan

- 1 Tugas pokok dan Fungsi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan TIK telah dibebankan sepenuhnya ke Dinas Kominfo, akan tetapi tidak semua permasalahan TIK mampu ditangani oleh Perangkat Daerah, ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan kewenangannya
- 2 Cukup banyaknya SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK akan tetapi tidak didayagunakan untuk pengembangan SPBE secara optimal, sementara banyak sekali fungsi pengelolaan TIK baik di Kantor Kominfo maupun di Perangkat Daerah yang membutuhkan penanganan SDM TIK.
- 3 Belum banyaknya kesempatan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan SDM pengelola TIK.

Sarana Prasarana TIK

- 1 Belum memiliki kelengkapan sarana prasarana TIK diantaranya Datacenter, Data recovery center, pusat operasional jaringan, perangkat pengamanan informasi,
- 2 Media transmisi jaringan yang meng-koneksikan seluruh Perangkat Daerah sampai dengan kelurahan, ada perencanaan sambungan fiber optik ke seluruh Perangkat Daerah. Akan tetapi saat ini media transmisi yang tergelar masih menyatu dengan milik pihak ketiga dan bukan milik murni pemerintah kabupaten, kedepan perlu dipertimbangkan sisi keamanan informasinya, sampai saat ini kapasitas kabel FO sudah mencukupi untuk melayani seluruh transaksi data pemerintah kabupaten,
- 3 Media transmisi juga redundant dengan jaringan wireless, sehingga tingkat ketersediaanya sangat tinggi apabila selalu terpelihara dengan baik,
- 4 Perangkat dan tatakelola keamanan informasi menjadi hal yang mutlak di implementasikan apabila seluruh sistem pemerintahan elektronik sudah berjalan dengan baik

Aplikasi

- 1 Setiap SKPD mempunyai layanan berdasarkan tupoksinya dan mempunyai data untuk diolah menjadi data / informasi baru akan tetapi masih banyak yang belum di otomatisasikan. Pengembangan aplikasi masih banyak yang belum sesuai dengan cetak biru pengembangan aplikasi dari Kominfo,
- 2 Website resmi pemerintah kabupaten beserta subdomainnya ada, kedepan perlu ditingkatkan ke tahap transaksional dan pada akhirnya sampai ke tahap interoperabilitas. Perlu dipahami bahwa website pemerintah kabupaten bukanlah sebagai media berita sebagaimana website detik.com. Website resmi pemerintah kabupaten sebaiknya lebih menonjolkan layanan masyarakat dan diseminasi potensi daerah.

Perencanaan

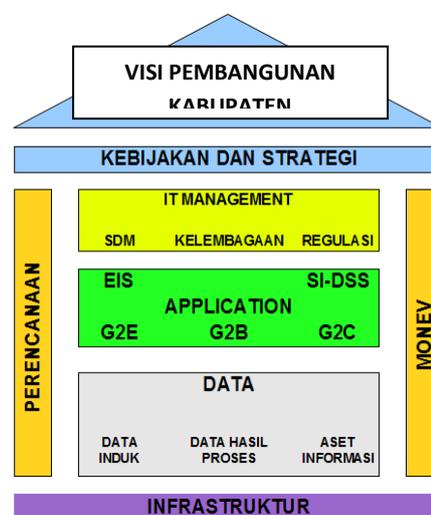
- 1 Belum ada team perencanaan pengembangan TIK dan juga belum ada mekanisme perencanaan pengembangan TIK yang melibatkan seluruh komponen Pemerintah kabupaten,
- 2 Belum ada perencanaan keberlanjutan system, sehingga jika terjadi masalah besar yang menyebabkan berhentinya sebagian besar atau seluruh layanan infrastruktur TIK, maka belum ada solusi yang cepat untuk merecovery keberlanjutan system.

Solusi.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir implementasi SPBE di pemerintah kabupaten Sumba Timur adalah dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengembangan SPBE yang sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur.
2. Penguatan kelembagaan dan kebijakan serta perencanaan SPBE,
3. Penguatan infrastruktur TIK dengan membangun Datacenter dan Data recovery Center; pemantapan jaringan internet milik pemerintah kabupaten serta pengelolaan keamanan informasi.
4. Pengembangan layanan TIK terintegrasi dengan pengelolaan data / informasi milik pemerintah kabupaten sebagai aset informasi yang bisa dikelola dan di manfaatkan bersama seluruh Perangkat Daerah dengan mekanisme dan dasar hukum yang jelas. Pengembangan layanan internal birokrasi pemerintah kabupaten, layanan masyarakat, dan layanan dunia usaha serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah vertikal dan horisontal
5. Pemanfaatan peran serta masyarakat dan pihak ketiga dalam mempercepat implementasi e-Government serta memastikan benarnya arah pengembangannya berdasarkan kaidah ilmu dan standar pengembangan dan pemanfaatan TIK.



Gambar 1

Gambaran kerangka pikir pengembangan e- Government sebagai solusi atas kondisi terkini di pemerintah kabupaten Sumba Timur sebagaimana terlihat pada gambar 1.

Rincian solusi implementasinya tersusun dalam format 5 (lima) dimensi penilaian pada dokumen pemeringkatan e-Government dari Kemenkominfo sebagai berikut :

Kebijakan

Penyusunan kelengkapan regulasi kebijakan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang ditetapkan melalui peraturan Bupati diantaranya :

- 1 Kelembagaan implementasi e-Government yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kabupaten serta penetapan visi dan misi pengembangan e-Government
- 2 Regulasi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan data, sistem informasi dan sarana prasarana TIK pemerintah kabupaten Sumba Timur
- 3 Regulasi sistem pengamanan informasi
- 4 Penyusunan SOP pengelolaan data, sistem informasi dan sarana prasarana TIK

Kelembagaan

1. Pembentukan fungsi strategis pengelolaan SPBE.
2. Restrukturisasi Perangkat Daerah Kominfo.
3. Reformasi pengelolaan sumber daya manusia bidang TIK seluruh Perangkat Daerah.

Sarana Prasarana TIK

1. Kesepakatan Jaminan layanan sebesar 99,5 %

2. Pemanfaatan pihak ketiga untuk pengelolaan Data Recovery center
3. Penguatan jaringan internet untuk menjamin aksesibilitas seluruh layanan pemerintah kabupaten
4. Pengelolaan keamanan informasi
5. Inventarisasi dan pengendalian pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana TIK

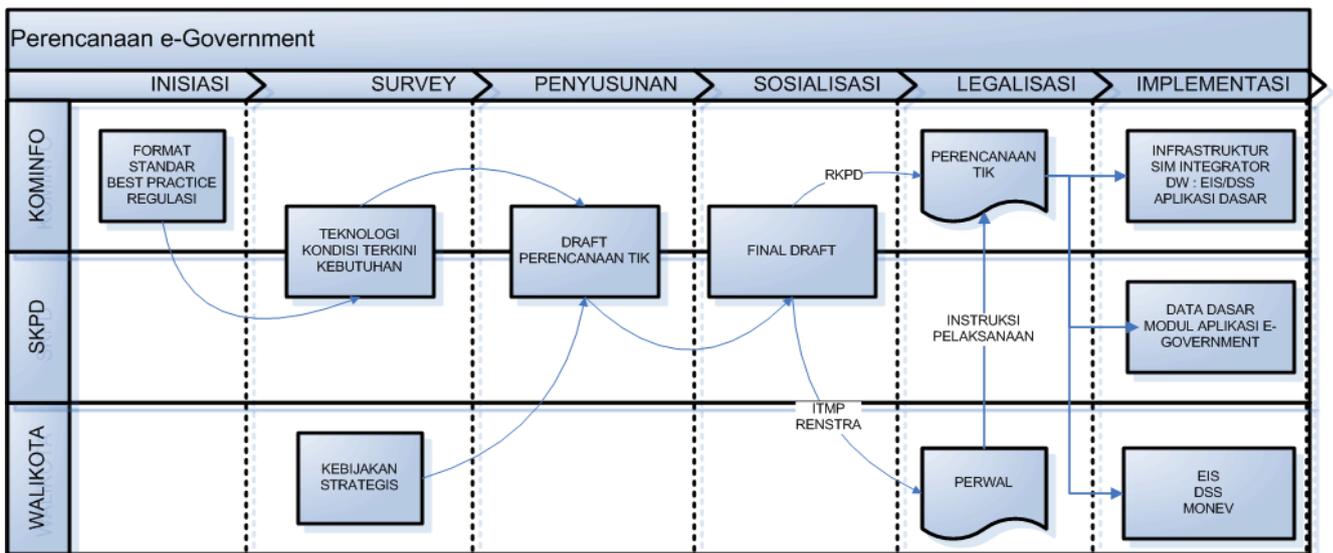
Aplikasi

1. Desain ulang website resmi beserta seluruh sub domainnya
2. Pengembangan aplikasi layanan utama e-Government sesuai visi pembangunan Kabupaten Sumba Timur
3. Inventarisasi dan pengendalian pengadaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan sistem informasi.

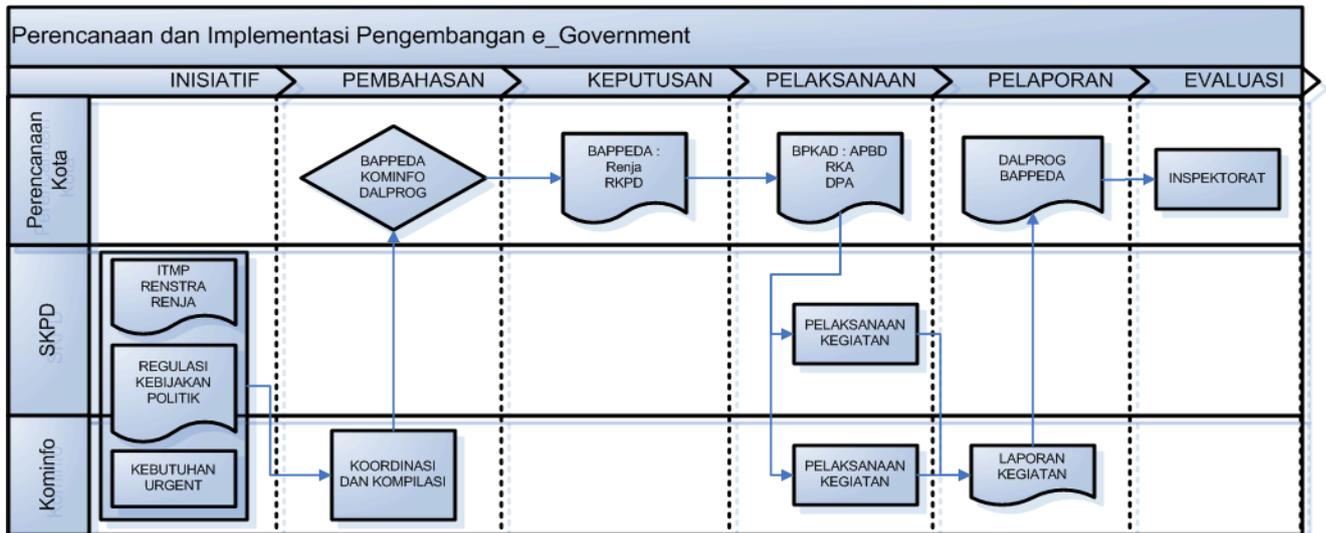
Perencanaan

1. Penetapan team perencanaan e-Government yang melibatkan seluruh komponen pemerintah kabupaten
2. Perencanaan TIK untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten
3. Perencanaan keberlanjutan

Sistem Mekanisme perencanaan seperti pada Gambar 2 dan 3 dibawah ini :



Gambar 2. Alur Perencanaan SPBE



Gambar 3. Mekanisme Perencanaan SPBE

KESIMPULAN

Pengadaan perangkat komputer tidak serta merta menjadi solusi atas permasalahan peningkatan kinerja pemerintah, output dari pengadaan perangkat adalah berupa alat untuk pelaksanaan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemahaman ini harus dimiliki oleh seluruh pengelola pemerintah kabupaten sehingga beban kerja implementasi SPBE bukan hanya oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika saja, akan tetapi merupakan gerakan bersama seluruh Perangkat Daerah yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah untuk melaksanakannya. Kunci utama gerakan ini adalah perubahan paradigma dari kinerja berbasis manual menjadi kinerja berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Criss Ross, Cobit 5. A Business Framework For the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, Algonquin Road Suite 1010 USA. 2012: 31-33.
- [2] Leonard Marten Doni Ratu, Perancangan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur (Studi Kasus), Bandung, ITB Bandung, 2013
- [3] Joko Widodo, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 2018.
- [4] Asman Abnur, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, KemenPAN-RB, Jakarta, 2018.